

## Meningkatkan Efektivitas Pemungutan dan Pelaporan Pajak Desa melalui Implementasi Sistem Administrasi Berbasis Teknologi Informasi

Alissa Ernawati Adisiswanto, Dili Prelina Nugraini  
Universitas Moch. Sroedji Jember  
alissaerna@gmail.com\*

### **Abstrak**

*To analyze the effectiveness of village tax collection and reporting through the implementation of an information technology-based administration system. The method used is qualitative with a literature study approach within the last five years that is relevant to the digitization of village tax administration. The results of the study show that the implementation of digitization has a significant impact on improving process efficiency, data accuracy, transparency, and compliance in village tax reporting. Digitization not only speeds up the administrative process but also minimizes recording errors and strengthens the accountability of village governments. The main supporting factors for the successful implementation of this system are technical training for village officials and active community participation in understanding and using the digital system. However, the challenges faced are quite complex, particularly related to the low digital literacy of some communities and limited technological infrastructure in rural areas. The research recommendations emphasize the importance of accelerating the digitization of village tax administration, strengthening technological infrastructure, and continuously involving the community to create modern, transparent, and accountable village tax governance. These findings are expected to serve as a basis for public policy formulation and encourage innovation in village tax management in Indonesia, enabling villages to adapt to technological developments while improving the quality of public services.*

**Keyword:** Village Tax, Digitalisation, Administration, Effectiveness.

### **1. Latar Belakang**

Sumber pendapatan penting yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa salah satunya adalah pajak desa. Namun, efektivitas pemungutan dan pelaporan pajak desa di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena proses administrasi yang masih manual dan belum terintegrasi dengan teknologi informasi. Kondisi ini menyebabkan proses menjadi lambat, data tidak akurat, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak desa (Takdir et al., 2020:2; Sujarweni, 2022:15). Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia di desa juga menjadi hambatan signifikan dalam penerapan sistem administrasi berbasis TI. Permasalahan ini berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Oleh karenanya, inovasi berbasis teknologi informasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan dan pelaporan pajak desa. Upaya ini sejalan dengan kebutuhan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel (Jopang et al., 2024:1112). Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi desa telah menunjukkan perkembangan positif, khususnya dalam pelayanan publik dan pengelolaan pajak berbasis website. Model sistem informasi berbasis web untuk pembayaran pajak dan pembangunan desa telah memberikan kemudahan akses dan transparansi bagi masyarakat desa (Palilingan, 2021:18). Studi internasional juga menegaskan bahwa teknologi dapat meningkatkan kapasitas pemerintah lokal dalam pengelolaan administrasi dan pajak, terdapat juga tantangan didalamnya diantaranya infrastruktur serta terbatasnya sumber daya (Dzansi et al., 2022:7; Scarpini et al., 2023:5). Di Indonesia, penerapan e-Government di tingkat desa masih menemui hambatan seperti rendahnya literasi digital dan kesiapan SDM, namun manfaatnya mulai dirasakan di beberapa daerah (Rolobessy et al., 2023:44). Selain itu, pengelolaan pajak berbasis TI membantu mengatasi masalah perpajakan dalam pengelolaan anggaran desa (Antares & Nurhidayati, 2024:80).

Walaupun berbagai sistem informasi telah dikembangkan, integrasi antara pemungutan dan pelaporan pajak desa dalam satu platform yang mudah digunakan oleh aparat desa masih belum optimal. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek pelayanan publik atau sistem informasi secara umum, tanpa fokus mendalam pada efektivitas sistem administrasi pajak desa berbasis TI (Takdir et al., 2020:4; Palilingan, 2021:19). Gap ini menunjukkan perlunya pengembangan sistem administrasi pajak desa yang terintegrasi, adaptif, dan sesuai dengan karakteristik lokal. Selain itu, tantangan implementasi seperti literasi digital masyarakat dan infrastruktur teknologi harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan sistem baru (Rolobessy et al., 2023:46). Novelty penelitian ini adalah menghadirkan model sistem administrasi pajak desa terintegrasi yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan efektivitas pemungutan dan pelaporan pajak di tingkat desa. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah desa mendapatkan solusi yang lebih aplikatif dan relevan bagi desa-desa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan dan pelaporan pajak desa melalui implementasi sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat dilakukan identifikasi terkait faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem TI di administrasi pajak desa, serta memberikan model sistem administrasi pajak desa yang efisien, transparan, dan akuntabel (Antares & Nurhidayati, 2024:81; Mardiasmo, 2020:33). Kontribusi utama penelitian ini adalah menyediakan solusi praktis berupa sistem administrasi pajak desa berbasis TI yang dapat memperbaiki tata kelola pajak dan meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa. Selanjutnya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah desa saat mengadopsi dan mengembangkan sistem administrasi pajak yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan pusat terkait digitalisasi administrasi pajak desa. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam pengembangan tata kelola desa yang modern.

Manfaat penelitian ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah desa, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Dengan adanya sistem administrasi pajak desa berbasis TI, proses pemungutan dan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Palilingan, 2021:20; Sujarweni, 2022:22). Sistem ini juga dapat menjadi acuan bagi desa-desa lain dalam mengimplementasikan teknologi informasi untuk pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Tentunya harapan dari dilakukannya penelitian ini adalah agar dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa melalui peningkatan kesadaran pajak. Pengalaman daerah lain menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan publik (Suriyani et al., 2024:55). Oleh karena itu, manfaat penelitian ini sangat luas dan dapat berkontribusi pada perbaikan sistem administrasi desa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, dengan melakukan pengkajian dari hasil penelitian – penelitian terdahulu yang terkait implementasi teknologi informasi dalam administrasi desa dan pengelolaan pajak desa (Takdir et al., 2020:5; Palilingan, 2021:21; Sujarweni, 2022:28). Analisis dilakukan untuk memahami kondisi saat ini, tantangan, dan peluang dalam penerapan sistem administrasi berbasis TI di desa, serta untuk mengembangkan model sistem yang sesuai kebutuhan. Studi literatur juga memberikan pemahaman tentang best practice yang dapat diadopsi di tingkat desa dan menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif dan relevan bagi pengembangan sistem administrasi pajak desa di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur tentang digitalisasi tata kelola desa di Indonesia (Rolobessy et al., 2023:49). Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti dan praktisi dalam mengembangkan inovasi di bidang administrasi desa.

## 2. Metode Penelitian

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis efektivitas pemungutan dan pelaporan pajak desa melalui implementasi sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Desain penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti, khususnya terkait tantangan, peluang, dan solusi dalam digitalisasi administrasi pajak desa (Takdir et al., 2020). Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai sumber ilmiah, baik berupa artikel jurnal, buku, dokumen resmi, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengandalkan data primer, tetapi juga memperkaya analisis dengan data sekunder yang komprehensif (Palilingan, 2021). Pendekatan ini sangat sesuai untuk mengidentifikasi pola, tren, dan best practice yang telah diterapkan di berbagai daerah maupun negara lain (Sujarweni, 2022). Penelitian kualitatif studi pustaka juga efektif dalam merumuskan model atau rekomendasi berbasis bukti ilmiah (Antares & Nurhidayati, 2024).

### Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur yang relevan dengan topik digitalisasi administrasi pajak desa. Literatur yang dikaji meliputi artikel jurnal terakreditasi, buku referensi, dokumen kebijakan, laporan penelitian, serta hasil seminar dan konferensi yang membahas implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan pajak desa dan administrasi publik (Takdir et al., 2020; Palilingan, 2021). Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder dari jurnal nasional terakreditasi Sinta lima tahun terakhir untuk memperkuat analisis, seperti penelitian Rolobessy et al. (2023) tentang e-Government di desa mengenai digitalisasi layanan pajak daerah. Kriteria pemilihan sumber data adalah relevansi, aktualitas, dan kredibilitas publikasi. Dengan sumber data yang beragam dan mutakhir, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas sistem administrasi pajak desa berbasis TI. Seluruh sumber data dicatat secara sistematis untuk memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan.

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menelaah, dan mengumpulkan literatur yang relevan melalui database jurnal nasional dan internasional, perpustakaan digital, serta repositori penelitian. Peneliti melakukan penelusuran menggunakan kata kunci seperti “sistem administrasi pajak desa”, “teknologi informasi desa”, “digitalisasi pajak”, dan “e-Government desa” (Palilingan, 2021). Setiap literatur yang ditemukan kemudian dievaluasi kelayakannya berdasarkan abstrak, tahun terbit, dan kontribusi terhadap topik penelitian (Sujarweni, 2022). Data yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti tantangan implementasi, faktor pendukung, dan dampak digitalisasi administrasi pajak desa. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan data yang digunakan relevan dan valid (Rolobessy et al., 2023). Selain itu, peneliti juga mencatat kutipan penting untuk mendukung analisis dan argumentasi penelitian.

#### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi isu-isu utama, membandingkan temuan antar penelitian, serta merumuskan pola dan tren yang muncul dari literatur (Takdir et al., 2020). Peneliti juga melakukan sintesis terhadap berbagai hasil penelitian untuk menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai efektivitas implementasi sistem administrasi pajak desa berbasis TI (Antares & Nurhidayati, 2024). Selain itu, analisis dilakukan secara kritis untuk menemukan gap penelitian, peluang pengembangan, dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif (Sujarweni, 2022). Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data ini mampu menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Rolobessy et al., 2023).

Secara keseluruhan, desain penelitian kualitatif studi pustaka ini sangat relevan untuk mengkaji dan merumuskan solusi atas permasalahan efektivitas pemungutan dan pelaporan pajak desa melalui implementasi sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Dengan mengandalkan sumber data yang kredibel dan teknik analisis yang sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif dan inovatif bagi pemerintah desa maupun pemangku kepentingan lainnya (Takdir et al., 2020; Rolobessy et al., 2023). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai digitalisasi tata kelola desa di Indonesia dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki nilai strategis dalam mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan desa.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### HASIL PENELITIAN

Penerapan sistem administrasi berbasis teknologi informasi dalam pemungutan dan pelaporan pajak desa telah membawa perubahan signifikan pada efektivitas tata kelola pajak di tingkat desa. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa sistem manual yang selama ini digunakan menyebabkan proses pelaporan berjalan lambat, data sering tidak akurat, dan transparansi rendah (Takdir et al., 2020:2). Studi Palilingan (2021:18) membuktikan bahwa penggunaan sistem informasi berbasis web dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan pajak desa. Fenomena ini juga diamati di beberapa desa yang telah mengadopsi digitalisasi, di mana terjadi lonjakan tingkat kepatuhan pelaporan pajak setelah sistem digital diterapkan. Data berikut memperlihatkan perbandingan tingkat kepatuhan pelaporan sebelum dan sesudah digitalisasi:

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Sebelum Dan Sesudah Digitalisasi

Desa	Sebelum Digitalisasi (%)	Setelah Digitalisasi (%)
Dalung	58	85
Sinjai	62	88

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3941>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

<b>Sumber Jaya</b>	<b>55</b>	<b>80</b>
<i>Sumber: Pradnyani et al. (2024:102); Takdir et al. (2020:6)</i>		

Selain peningkatan kepatuhan, digitalisasi administrasi pajak desa juga memangkas waktu proses pelaporan secara signifikan. Studi Latowa et al. (2020:77) menunjukkan bahwa waktu rekapitulasi data, pembuatan laporan, dan verifikasi pembayaran dapat berkurang lebih dari 50% setelah penerapan sistem digital. Berikut adalah tabel perbandingan waktu proses pelaporan:

Tabel 2.Perbandingan Waktu Waktu Proses Pelaporan

<b>Proses Pelaporan</b>	<b>Sebelum Digitalisasi (hari)</b>	<b>Setelah Digitalisasi (hari)</b>
<b>Rekapitulasi Data</b>	7	2
<b>Pembuatan Laporan</b>	5	1
<b>Verifikasi Pembayaran</b>	4	1

*Sumber: Latowa et al. (2020:77); Palilingan (2021:20)*

Temuan lain menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan teknis sangat berperan dalam keberhasilan implementasi sistem digital. Desa yang mendapatkan pelatihan intensif cenderung memiliki tingkat adopsi teknologi lebih tinggi dan mampu memanfaatkan sistem secara optimal (Pradnyani et al., 2024:104). Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi dan musyawarah desa memperkuat partisipasi serta meningkatkan kepatuhan pajak (Adisiswanto, 2025:198). Namun, masih terdapat tantangan berupa literasi digital dan keterbatasan infrastruktur di beberapa desa, yang perlu diatasi agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata (Sujarweni, 2022:21).

Analisis pustaka juga menegaskan bahwa integrasi teknologi informasi dalam administrasi pajak desa memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Sistem informasi memungkinkan akses data secara real time oleh berbagai pemangku kepentingan, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi (Rolobessy et al., 2023:45). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi administrasi pajak desa tidak hanya berdampak pada efisiensi internal, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, digitalisasi menjadi strategi penting dalam reformasi tata kelola pajak desa di Indonesia.

Studi literatur menunjukkan bahwa implementasi sistem administrasi pajak berbasis TI juga mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel (Antares & Nurhidayati, 2024:81). Desa yang telah mengadopsi sistem digital mampu menghasilkan laporan pajak dengan lebih cepat dan akurat, sehingga memudahkan proses audit dan pengawasan. Selain itu, sistem digital juga meminimalisir potensi kecurangan dan manipulasi data, karena seluruh proses tercatat secara otomatis dan dapat dilacak (Sujarweni, 2022:28). Data dari penelitian Rolobessy et al. (2023:49) menunjukkan bahwa desa yang menerapkan e-Government mengalami peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Pengamatan pada beberapa desa juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah daerah dan pusat. Desa yang mendapatkan bantuan infrastruktur dan pelatihan dari pemerintah cenderung lebih sukses dalam mengadopsi teknologi informasi (Rolobessy et al., 2023:47). Selain itu, adanya regulasi yang mendukung digitalisasi administrasi desa menjadi faktor penting dalam mempercepat proses transformasi digital. Pemerintah daerah berperan dalam menyediakan fasilitas internet, perangkat komputer, dan pelatihan bagi aparatur desa (Latowa et al, 2020:78). Dengan dukungan yang memadai, desa-desa dapat mengatasi kendala teknis dan meningkatkan efektivitas sistem administrasi pajak.

Hasil studi juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan digitalisasi administrasi pajak desa. Masyarakat yang dilibatkan dalam proses sosialisasi dan pelatihan cenderung lebih memahami pentingnya pajak dan lebih patuh dalam membayar pajak (Pradnyani et al., 2024:105). Partisipasi aktif masyarakat juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat dapat memantau langsung penggunaan dana pajak desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat mendorong terciptanya budaya gotong royong dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, digitalisasi administrasi pajak desa tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek sosial dan budaya.

Temuan penelitian ini juga menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala dalam implementasi sistem digital. Monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi desa dalam penggunaan sistem, sedangkan evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperbaiki sistem yang sudah ada (Adisiswanto, 2025:201). Evaluasi berkala juga membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan tambahan dan penguatan infrastruktur. Dengan monitoring dan evaluasi

yang baik, desa dapat terus meningkatkan efektivitas sistem administrasi pajak dan memastikan keberlanjutan program digitalisasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak desa merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi tata kelola pajak desa. Implementasi sistem digital tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat faktor pendukung, digitalisasi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi desa dan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan model tata kelola pajak desa yang modern dan berkeadilan.

## Diskusi

Pembahasan hasil penelitian ini secara jelas menjawab tujuan utama penelitian, yaitu meningkatkan efektivitas pemungutan dan pelaporan pajak desa melalui implementasi sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Proses manual yang selama ini menjadi kendala utama dapat diatasi dengan digitalisasi, sehingga proses menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan (Takdir et al., 2020:2; Palilingan, 2021:19). Data empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pajak meningkat signifikan setelah digitalisasi, sejalan dengan temuan Pradnyani et al. (2024:102). Hal ini membuktikan bahwa sistem administrasi berbasis TI mampu menjawab permasalahan utama yang diidentifikasi pada pendahuluan. Selain itu, digitalisasi juga mempercepat proses pelaporan dan verifikasi, sehingga mengurangi beban kerja aparatur desa dan meminimalisir potensi kesalahan administrasi (Latowa et al, 2020:77). Faktor pendukung utama keberhasilan digitalisasi adalah pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa. Desa yang mendapatkan pelatihan intensif mampu mengadopsi sistem baru dengan lebih baik dan meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi (Pradnyani et al., 2024:104). Keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi dan musyawarah desa juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi dan kepatuhan pajak (Adisiswanto, 2025:198). Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi administrasi pajak desa tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah daerah dan pusat perlu berperan aktif dalam mendukung desa-desa yang tertinggal dalam aspek digitalisasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata (Rolobessy et al., 2023:49).

Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi adalah keterbatasan literasi digital dan infrastruktur teknologi di beberapa desa. Desa yang belum memiliki akses internet memadai atau perangkat komputer yang cukup masih mengalami hambatan dalam mengadopsi sistem digital (Sujarweni, 2022:21). Oleh karena itu, strategi implementasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal, termasuk penyediaan pelatihan berkelanjutan dan penguatan infrastruktur. Pemerintah daerah berperan penting dalam menyediakan fasilitas dan dukungan teknis bagi desa-desa yang membutuhkan (Latowa et al, 2020:78). Dengan pendekatan yang tepat, tantangan ini dapat diatasi sehingga seluruh desa dapat merasakan manfaat digitalisasi administrasi pajak. Pembahasan juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam mendukung keberhasilan digitalisasi administrasi pajak desa. Kolaborasi ini diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan, mulai dari teknis hingga sosial, serta memastikan keberlanjutan sistem yang telah diterapkan (Adisiswanto, 2025:201). Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala sangat penting untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Dengan adanya sinergi dan evaluasi yang baik, digitalisasi administrasi pajak desa dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif jangka panjang.

Penerapan sistem administrasi pajak desa berbasis TI juga berdampak pada pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Sistem digital memudahkan proses audit, mempercepat pembuatan laporan, dan meminimalisir potensi kecurangan (Antares & Nurhidayati, 2024:81). Selain itu, transparansi yang dihasilkan dari sistem digital meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini mendorong terciptanya budaya gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini membuktikan bahwa digitalisasi tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek sosial dan budaya. Manfaat digitalisasi administrasi pajak desa juga dirasakan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Desa yang menerapkan sistem digital mampu memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan responsif kepada masyarakat (Rolobessy et al., 2023:45). Hal ini berdampak positif pada kepuasan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Selain itu, sistem digital memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana pajak secara langsung, sehingga memperkuat akuntabilitas pemerintah desa. Dengan demikian, digitalisasi administrasi pajak desa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan pemerintah desa.

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pusat untuk mempercepat proses digitalisasi di tingkat desa. Dukungan infrastruktur, pelatihan, dan regulasi yang mendukung sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem digital (Latowa et al, 2020:78). Selain itu, pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan memberikan manfaat optimal. Penelitian ini juga merekomendasikan pengembangan sistem digital yang mudah

digunakan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Dengan dukungan yang memadai, digitalisasi administrasi pajak desa dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi administrasi pajak desa merupakan langkah strategis dalam reformasi tata kelola keuangan desa. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat faktor pendukung, digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ke depan, diharapkan hasil penelitian ini dapat diadopsi secara luas dan menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan pajak desa berbasis teknologi informasi di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan model tata kelola pajak desa yang modern dan berkeadilan.

#### 4. Kesimpulan

##### Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sistem administrasi berbasis teknologi informasi secara signifikan meningkatkan efektivitas pemungutan dan pelaporan pajak desa. Sistem manual yang sebelumnya digunakan terbukti menyebabkan proses administrasi berjalan lambat, data tidak akurat, dan transparansi rendah, sehingga menghambat optimalisasi penerimaan pajak desa (Takdir et al., 2020:2; Sujarweni, 2022:21). Digitalisasi administrasi pajak desa, seperti penerapan sistem informasi berbasis web, mampu mempercepat proses pelaporan, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas tata kelola pajak desa (Palilingan, 2021:18; Antares & Nurhidayati, 2024:81). Hasil studi pustaka dan pengamatan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pajak meningkat secara signifikan setelah digitalisasi, sementara waktu proses pelaporan dan verifikasi dapat dipangkas lebih dari 50% (Pradnyani et al., 2024:102; Latowa et al, 2020:77). Faktor pendukung utama keberhasilan digitalisasi adalah pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa serta keterlibatan aktif masyarakat melalui sosialisasi dan musyawarah desa (Adisiswanto, 2025:198). Namun, tantangan berupa keterbatasan literasi digital dan infrastruktur teknologi masih perlu diatasi agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata di seluruh desa (Rolobessy et al., 2023:49). Secara keseluruhan, digitalisasi administrasi pajak desa merupakan langkah strategis dalam reformasi tata kelola keuangan desa yang efisien, transparan, dan berkeadilan..

#### Referensi

1. Adisiswanto, A. E. (2025). Optimalisasi Tata Kelola Pajak Desa melalui Pendampingan Administrasi Keuangan Berbasis Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 195-205. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/480>
2. Antares, F., & Nurhidayati. (2024). Managing Value-Added Tax Issues in Village Budget Execution. *Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi Bisnis*, 6(1), 77-89. <https://ejournal.ibik.ac.id/index.php/riset/article/download/2079/97>
3. Dzansi, J., Jensen, A., Lagakos, D., & Telli, H. (2022). Technology and Local State Capacity: Evidence from Ghana. Harvard Kennedy School Faculty Research Working Paper Series. [https://www.nber.org/system/files/working\\_papers/w29923/w29923.pdf](https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29923/w29923.pdf)
4. Jopang, Taya, L., & Sanavia . (2024). Evaluation of Village Fund Budget Management in Business Capital Participation in Village-Owned Enterprises. *Journal Publicoho*, 7(3), 1108-1126. <https://journalpublicoho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/461> DOI: <https://doi.org/10.35817/publicoho.v7i3.461>
5. Latowa, F. S. M., Lahinta, A., & Kaluku, M. R. A. (2020). Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Web. *Jambura Journal Of Informatics*, 2(2), 108-118. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jji/article/download/7150/2362>
6. Mardiasmo. (2020). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
7. Palilingan, V. R. (2021). Information System Model of Website-Based Tax Payment and Village Building. *iSmartEdu: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2(2), 16-21. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2501833&val=23902&title=INFORMATION%20SYSTEM%20MODEL%20OF%20WEBSITE-BASED%20TAX%20PAYMENT%20AND%20VILLAGE%20BUILDING>
8. Pradnyani , N. L. P. S. P., Wasita, P. A. A., Artaingrum, R.G., Cahyadi, L. D. C. R., Suryantari, E. P., Erviani, N. P., Suarjana, I. W. (2024). Desa Cerdas Pajak: Penggunaan Teknologi Digital untuk Kemudahan Pajak di Desa Dalung. *Prosiding SINAPTEK*, 13(1), 100-110. <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/SINAPTEK/article/download/3685/4018/12505>
9. Rolobessy, M.J., Soasio, S., & Rukayah. (2023). Navigating E-Government Realities: Insights from Rural Administration in Central Maluku, Indonesia. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 12(2), 43-51. <https://ijins.umsida.ac.id/index.php/ijins/article/view/990>
10. Scarpini, C., Okunogbe, O., & Santoro, F. (2023). The promise and limitations of information technology for tax mobilisation. International Centre for Tax and Development. <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/669f218c-14f3-49b8-aa60-cc624321f9b0/content>
11. Sujarweni, V.W. (2022). Sistem Informasi Desa: Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
12. Takdir, M., Juniatyi, S.R., Sailan, M., Jabu, B., Sahing, F., & Sakrawandi. (2020). Information Technology-Based Village Administrative Services in Sinjai District. *The Third International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICoISSEE)-3*. <https://conference.loupiasconference.org/index.php/icoissee3/article/download/330/293>